

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TERNATE DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

Irwan Lukman

Program Studi Administrasi Publik, FISIP,
Universitas Tibhuwana Tunggadewi Malang
Email: irwanwaigitang111@gmail.com

Abstrak: Pemerintah Kota Ternate pada Khususnya Dinas Pendidikan menyadari dengan benar akan kebutuhan dasar peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ternate sebagai alat peningkatan kualitas untuk membangun karakter dan moral yang baik untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah seharusnya mengetahui bahwa pendidikan adalah hak untuk warga negara seperti yang sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31. Dan dilanjutkan pada Tahun 1994 Peresidan Repoblik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Kebijakan yang di keluarkan pemerintah ini sudah cukup berhasil untuk mrningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan sesuai yang di amanahkan dalam UUD. Masih ingatkah kita melihat persoalan Pendidikan yang terjadi di berbagai daerah terpencil. Salah satunya di Daerah Maluku Utara, masih banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah dan ini adalah tugas kita Bersama untuk menyelesaikan problem permasalahan tersebut.

Kata kunci: *Kebijakan Pendidikan; Wajib Belajar*

Abstrak: The Government of Ternate in particular the Office of Education is well aware of the basic needs of improving the quality of education in Ternate City as a means of improving quality to build good character and morals for the people of Indonesia. For this reason, the government should know that education is a right for citizens as stipulated in the 1945 Constitution Article 31. And continued in 1994 the Indonesian Republik Peresidan issued Presidential Instruction No. 1 of 1994 concerning Guidelines for the Implementation of Compulsory Education for Basic Education. This policy issued by the government has been quite successful in increasing community participation in getting education according to what is mandated in the Constitution. Do we still remember the problem of Education that occurred in various remote areas. One of them is in the North Maluku Region, there are still many problems that have not been resolved by the Government and this is our shared duty to solve these problems.

Keyword: *Education Policy; Compulsory*

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional mempunyai tujuan terwujudnya sebuah sistem untuk membentuk kepribadian masyarakat yang efektif dan kepribadian dinamis. Oleh karena itu sebagai sebuah pelaksana untuk mencapai cita-cita dan gagasan yang mulia tersebut tugas dan kewajiban pemerintah adalah, untuk berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah telah menggratiskan Pendidikan wajib belajar, hal ini dilatari tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses, yang membuat Pendidikan sangat sulit untuk di dapatkan, pemerintah mengupayakan agar masyarakat Indonesia mendapatkan Pendidikan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia, agar tujuan Pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan generasi bangsa yang cerdas, Pendidikan memegang peran penting suatu ranah kehidupan dan berbangsa , karena

disinilah cita-cita suatu bangsa yang akan diteruskan oleh generasi muda, untuk itu pemerintah pada khususnya kota ternate harus mengupayakan suatu Gerakan agar akses Pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia. Kota Ternate dalam hal ini masih banyak terjadi permasalahan di ranah Pendidikan, oleh karena itu pemerintah seharusnya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kota Ternate merupakan sentral dari Pendidikan, sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kota Ternate masih menyisakan banyak persoalan, salah satunya adalah masalah pemerataan fasilitas pendukung Pendidikan seperti halnya tenaga pendidik, fasilitas bangunan yang tidak memadai di sekolah dan belum meratanya distribusi guru kota ternate diberbagai pulau khususnya yang masuk di wilayah Kota Ternate. Selain itu juga memberikan pendidikan minimal bagi Warga Negara untuk dapat mengembangkan karakter anak bangsa agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat.

Kota Ternate merupakan Kota Pendidikan yang baik. Sehingga pemerintah perlu pengembangkan dan meningkatkan potensi pendidikan agar masyarakat di Kota Ternate lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah lain. Peran penting inilah tentunya tidak muda bagi pemerintah dan perlu adanya ketrlibatan public dan Pemerintah Daerah dalam merancang dan memantapkan aspek kebijakan pendidikan yang belum maksimal (<http://malutpost.com>). Data dan informasi menunjukkan bahwa diantara 34 propinsi di Indonesia, Pendidikan Maluku utara menempati rengking ke 27. Ini menjadi suatu problem masalah yang besar yang segera dipecahkan oleh penentu kebijakan, apalagi Kota Ternate adalah Kota Pendidikan yang baik di Maluku Uatara sendiri. Untuk itu harus adanya arahan pemerintah agar permasalahan Pendidikan cepat di selesaikan supaya masyarakat mendapatkan Pendidikan yang layak sesuai yang di cantumkan dalam UUD 1945.

Untuk Suatu keputusan kebijakan publik yang mencakup tindakan dari seorang pejabat publik atau lembaga yang resmi untuk menyepakati, merubah atau menolak suatu kebijakan yang dipilih. Dalam bentuk yang positif, keputusan kebijakan bisa berupa undang-undang atau dikeluarkanya perintah-perintah eksekutif. Menurut Dunn dalam Keban, (2008:67). Dalam kebijakan publik harus dilihat beberapa hal penting antara lain; penetapan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Kebijakan publik menurut Winarno (2005:17) kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Dalam pengertian tersebut menunjukkan hal-hal tersebut.

1. Kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah
2. Aktor-aktor yang diluar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya
3. Faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya

Tiga hal tersebut menjadi kenisahayaan karena dengan berkembangnya informasi yang sangat cepat akibat proses globalisasi menjadikan masyarakat semakin kritis. Kekritisan itu akan membawah persoalan ketika sektor diluar negara tidak dilibatkan sejak awal, menjadi kebijakan mengalami kontra produktif artinya kebijakan tidak memiliki pengaruh apa pun di semua sektor.

Sedangkan Nugroho dalam Setyawan (2017:18) kebijakan publik segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah. Kebijakan publik merupakan aspek penting dalam ilmu administrasi publik. Hasil dari kebijakan publik bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, Perwali dan seterusnya yang dapat menjadi pedoman bagi suatu organisasi publik. Dari pada itu, pemerintah maupun organisasi publik yang tidak dapat melakukan aktivitasnya tanpa adanya suatu kebijakan. Kebijakan publik merupakan tuntunan atau pegangan sekaligus menjadi pedoman untuk organisasi

pemerintah dan swasta dalam bertindak. Sebab itu kebijakan publik harus mendahului semua kegiatan manajemen publik. Manajemen publik adalah implementasi dari kebijakan yang telah dirumuskan.

Howlet dan Ramesh dalam Subarsono (2006:13), bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melakukan kebijakan supaya mencapai tujuan yang ditentukan. Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Nugroho dalam Setyawan (2017:113) mengemukakan tiga generasi pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan dalam implementasi kebijakan publik generasi pertama terjadi pada tahun 1970-an, dimana kebijakan dipandang sebagai masalah-masalah antara kebijakan dengan eksikusnya. Pada generasi yang dilakoni oleh Allison dengan studi kasus misil Kuba (1971-1999) ini, dengan studi pengambilan keputusan sektor publik. Generasi kedua terjadi pada tahun 1980-an generasi ini mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan publik dari atas bawah, generasi ini lebih fokus pada tugas birokrasi dalam menjalankan kebijakan publik yang telah diputuskan secara politik. Generasi ketiga, terjadi pada tahun 1990-an generasi ini menyoroti variabel aktor pelaksana implementasi kebijakan publik lebih menentukan keberhasilan.

Menurut George Edwards III dalam Indiahono (2009:31-32) studi implementasi kebijakan publik adalah kursial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsukuensi-konsukuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. ketika kebijakan itu tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan dianggap gagal walaupun kebijakan tersebut sudah diimplementasikan. Semntara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan Edward III dengan mengajukan dua pertanyaan, apa yang diperlukan sehingga menjalankan implementasi kebijakan berhasil dan yang menjadi hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal. Edward III menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Oleh karena empat faktor variabel tesebut yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berintraksi satu sama lain untuk membantu atau memperhambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Patut diperhatikan disini bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak intraksi dan variabeloleh karenanya, tidak ada variable tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, dan bagaiman variabel-variabel ini mempengaruhi proses kebijakan.

1. Komunikasi;
2. Sumber Daya;
3. Disposisi;
4. Struktur Birokrasi;

Bratanata dkk dalam Ahmadi dan Uhbiyati (2007:69). Pendidikan merupakan usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu peserta didik agar perkembangannya untuk mencapai kedewasaannya. Menurut Brown dalam Ahmadi (2004:74) bahwa pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar dimana perubahan-perubahan didalam tingkah laku dihasilkan didalam diri orang itu melalui didalam kelompok. Dari pandangan ini pendidikan adalah suatu proses yang mulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup. Ahmadi dan Uhbiyati (2007:70) mengemukakan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicitacitakan dan berlangsung terus menerus. Pendidikan dapat di tempuh melalui tiga jalur yaitu:

Pendidikan Formal. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang pendidikan formal didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. **Pendidikan Non Formal.** Pendidikan Non formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Undang-Undang No 20 TAHUN 2003). **Pendidikan Informal.** Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang yang berbentuk kegiatan secara mandiri. Suprijanto (2005: 6-8).

Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai keberhasilan pendidikan Nasional sebagai berikut. Untuk Meningkatkan kemampuan profesionalitas pendidik serta meningkatkan mutu jaminan kesejahteraan tenaga pendidik agar bisa berfungsi secara optimal dan profesional terutama dalam peningkatan Pendidikan karakter, agar dapat mengembalikan wibawah dan tenaga kependidikan. Melakukan pembaharuan sistem Pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani dan tidak membedakan agam untuk penyusunan kurikulum yang berlaku di kanca nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan Nasional.

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, didalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program Pendidikan yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berusia 6 Tahun sampai 16 Tahun dapat mengikuti program wajib belajar 9 Tahun apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan dan didalam ayat (3) warga negara Indonesia berusia diatas 15 tahun dan yang belum lulus di pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikan sampai lulus atas biaya Pemerintah dan atau Pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*); Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya. Karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian ini juga yang digunakan untuk mendekati suatu problem dan jawaban yang pasti. Yang menjadi tempat atau lokasi penelitian adalah (di dinas Pendidikan kota Ternate). Jl. Maliaro Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah. Profinsi Maluku Utara.

Sumber data menyangkut kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan dan juga validitasnya. Moleong (2012:157) memberikan pengertian terkait sumber data adalah setiap kata-kata atau tindakan yang diamati atau diwawacarai merupakan sumber data utama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dengan proses penyebaran kuisioner, wawancara dengan responden yang ada di Dinas Pendidikan Kota Ternate. Karena dalam memilih sumber data peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan dan juga validitasnya. sumber data dalam penelitian ini. Oleh karena itu, di dalam memilih siapa yang akan menjadi informan, peneliti harus memahami sikap dan posisi dengan berbagai peran dan keterlibatannya dengan kemungkinan akses untuk mendapatkan suatu informasi harus memiliki sesuai dengan hasil atau kebutuhan diperlukan dalam penelitiannya.

PEMBAHASAN

Data penelitian lapangan ini berguna untuk menjelaskan masalah yang terjadi. Hasil analisis data menggunakan teori yang mana indikator atau alat ukur yang menjadi acuan untuk melihat upaya pemerintah Kota Ternate dalam mengimplementasi kebijakan pelaksanaan kebijakan wajib belajar Sembilan Tahun di Kota Ternate, sejauh mana isi kebijakan dan konteks kebijakan di pengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil analisis dan penelitian ini melihat tanggapan dari informan terkait dengan implementasi kebijakan tersebut yang pada dasarnya untuk memberikan kemudahan akses setiap masyarakat memperoleh pendidikan dasar yang layak sesuai aturan yang berlaku, untuk itu perlu adanya satu peraturan yang mengikat agar implementasi tersebut berjalan dengan baik.

Komunikasi

Kalua dilihat dengan teori yang ada Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate tidak hanya dengan individu tau secara kelompok, tetapi dengan pemangku kepentingan kebijakan yang ada instansi tersebut proses implemenatasi kebijakan wajib belajar 9 Tahun dapat berjalan sukses sesuai dengan harapan. Komunikasi yang baik dan intens akan berdampak kepada dinas Pendidikan Kota Ternate. Komunikasi tidak hanya sebatas kepada individu dengan individu yang lain, akan tetapi seluruh pemangku kepentingan yang menjadi dari bagian kebijakan tersebut. Dukungan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate terhadap pelaksana tugas di lapangan diharapkan akan memberikan pemahaman sehingga ada pemerataan ditingkatan pelaksanaan kebijakan.

Pada gilirannya akan membawa perubahan kepada cita-cita Pancasila sebagai bentuk idealnya. Berdasarkan teori Edward III dipergunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kota Ternate, terdapat beberapa indikator yang dapat diurai dengan penjelasan terkait dengan dimensi masing-masing.

- Kmunikasih
- Sumberdaya
- Disposisi
- Struktur Birokrasi

Kebijakan wajib belajar 9 tahun yang berada di Kota Ternate pada aspek fragmentasi tidak mengganggu kinerja pelaksana yaitu sekolah. Hasil penelitian ini berdasarkan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat ditarik kesimpulan bahwa, implentasi kebijakan tentang wajib belajar masih ada permasalahan pada sikap pelaksana kebijakan di wilayah Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate. Dengan dukungan data dokumentasi dan wawancara dengan informan penelitian menunjukkan pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan tidak sensitif dengan laporan-laporan

yang diberikan sekolah terkait dengan kendala banyaknya tenaga honorer dan infrastruktur (perpustakaan). Selain itu, rombongan belajar yang mana tidak sesuai dengan kapasitas ruangan dan 2 sekolah bergantian pagi dan siang untuk memakai 1 bangunan sekolah.

Faktor pendukung dalam menjalankan suatu kebijakan sangat dibutuhkan dalam sebuah lembaga demi tercapainya tujuan lembaga tersebut. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota ternate dalam hal ini adalah dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan menemui berbagai factor pendukung dan penghambat, seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut Tidak seberapa signifikan karena kota ternate mempunyai sumber daya yang baik dan mengimplementasikan kebijakan itu sendiri. Kesedaran orang tua tentang pendidikan itu sangat tinggi sehingga memungkinkan program wajib belajar berjalan dengan baik dan semua kinerja Dinas pendidikan Kota Ternate berjalan sesuai dengan prosedurnya akhirnya mampu untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sejauh ini Program wajib Belajar 9 Tahun di Kota ternate berjalan dengan baik yang menjadi salah satu faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, yang mana untuk mengimplemenasikan program wajib belajar ini,. Membangun mitra dengan pihak sekolah dan komite sekolah dan orang tuawali dan membuka kegiatan bersama, dan masyarakat masih percaya terhadap apa yang Dinas Pendidikan kota ternate kerjakan.

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Kota Ternate sebagai pemangku kebijakan sudah melakukan kerja sama melalui, sosialisasi dengan masyarakat, selain itu juga yang menjadi faktor pendukung yakni berkomunikasi, dinas pendidikan selaku pelaksana kebijakan, namun pernyataan yang di sampaikan oleh informan diatas belum maksimal karena masih ada factor penghambat yang di kemukakan oleh informan lainnya.

Dalam menjalankan sebuah kebijakan dalam instansi pemerintahan, faktor penghambat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa di hindari, dan faktor penghambat selalu dihargai sebagai sebuah dinamika untuk implementasi kebijakan. Di Maluku Utara salah satu propinsi Kepulauan dan Kota ternate berbagi beberapa kecamatan yang ada di Kota Ternate tersebut, ini menjadi objek penghambat untuk menjalankan sebuah kebijakan tersebut. dan masalah yang di hadapi saat ini adalah banyaknya guru honorer di beberap sekolah, dan masalah infrastruktur. Kekurangan terhadap tenaga pengajar akan menghambat suatu kebijakan dikarenakan beberapa guru yang bukan wilayah kemampuannya terkadang harus mengajar untuk menutupi kekurangan tersebut. Sedangkan untuk menambah kuota guru, masih terkendala oleh pendanaan karena ketersediaan dana yang terbatas.

Fasilitas juga pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk melaksanakan implementasi kebijakan wajib belajar ini diperlukanya fasilitas-fasilitas yang mendukung sperti tersedianya ruang kelas yang memadai untuk menampung jumlah siswa setiap tahunya, mempunyai sarana prasaran sekolah seperti laboraturium, perpustakaan dan kumputer yang berkualitas.

Dengan hasil wawancara tersebut di simpulkan dilapangan menunjukan fasilitas yang ada di sekolah masih kurang seperti halnya , perpus, kompuiter dan fasilitas lainnya. Factor komunikasi di ikut, factor disposisi, factor sumberdaya dan factor struktur biroktasi. Dalam kebijakan ini berjalan baik beberapa sekolah yang ada di Desa-desa Kota Ternate itu harus menambahkan fasilitas bangunan dan tenaga pendidik. Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan masi banyak juga sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Masih banyak fasilitas yang kurang untuk pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sehingga dalam proses belajar mengajar ketepatan waktu untuk menyelesaikan satu mata pelajaran menjadi lama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan implementasi kebijakan wajib belajar Sembilan Tahun Kota Ternate yang dinyatakan belum bisa berjalan optimal dikarenakan;

1. Kurangnya minat dari pegawai Dinas Pendidikan
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Pendidikan
3. Kapasitas Implementator yang belum memadai baik kuantitas dan kualitas
4. Kondisi Lingkungan pada aspek geografi dan demografi
5. Akses sarana dan prasarana

Pendidikan adalah sebuah sarana yang penting guna membangun sebuah eksistensi bangsa dan Negara yang dinamis, sebagai wujud pelaksana cita-cita yang luhur untuk mencapai gagasan yang mulia tersebut, tugas pokok Negara adalah mengayumi dan berperan aktif dalam meningkatkan Pendidikan. Dalam rangkai mewujudkan suatu circa-cita Pendidikan Nasional, dalam saat ini Pemerintah Kota Ternate masih dihadapkan berbagai problem permasalahan, dan ini perlu cepat diselesaikan oleh pihak pemangku kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budo Winarno Edisi 2016. *Kebijakan Publik di Era Globalisasi, Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*, Yogyakarta, CAPS (Center Of Academic Publiching Srvice).
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Cholid & Achmadi. 2008. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fatimah DKK. *Panduan Melakukan Advokasi: Pahanmi dan Lakukan perubahan*: Malang. Malang Corruption watch. Wisma Kalimetro.
- Laila Nupratiwiningsi. 2011. *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di kecamatan Banteng Kabupaten tega*.
- Lintang Hottua SimbolonI. 2016. *Implementasi Wajib Belajar Dalam kebijakan Legsilasi Pemerintah Kota*. BandarLampung.(Online),(file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Documents/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN) Pada tanggal akses 04 Mei 2017 Bukit Hijau
- Munadi dan Barnawi. 2001. *Kebijakan Publik Bidang Pendidikan*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media
- Nasution.. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Syahdan. 2011. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Non Formal Dalam Menuntaskan Buta Aksara di Kabupaten Sintang*.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- WahyudiBarmawai.d&sxsrf=ACYBGNQa0U7pBjOymkKs2gUJZzjbJDDI1g:1573493689371&uact=5&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:2-DKvU6l-w-l9M:scholar.google.com/ (Online) pada tanggal akses 04 mei 2017 Bukit Hijau.